

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep)

¹Fatimah Azis, ²Irmawati

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail: fatimah.azis@unismuh.ac.id

Abstract

The Role of Community Empowerment Institutions in Village Development in Sabalana Village, Liukang Tangaya District, Pangkep Regency. Educational Sciences, Muhammadiyah University of Makassar. This study aims to determine the role of Community Empowerment Institutions in Village Development, the supporting and inhibiting factors of Community Empowerment Institutions in Village Development. This study used descriptive qualitative research. In this study, the informants were selected directly by the researcher who was called the research target. Based on the characteristics, the informants who had been appointed were the Village Head, Head of the Community Empowerment Institute and the Villagers. This study used observation and interviewing as a tool to collect the data. Based on the results of research in the field, the researcher could see that the role of the Community Empowerment Institution in Village Development in Sabalana Village where the chairman and members of the Community Empowerment Institute have carried out their duties and functions in carrying out every development carried out in Sabalana Village but has not been very effective yet. Factors that support Community Empowerment Institutions in Village Development are the resources owned by the Village officers and always holding coordination meetings. The inhibiting factors of the Community Empowerment Institution in Village Development are sea transportation and the lack of participation of the Villagers in assisting the village officers and the head of the Community Empowerment Institute in carrying out any existing development. The success of the Community Empowerment Institution in increasing development in Sabalana Village, therefore, there is a need for cooperation between the village officers, head of the Community Empowerment Institution (LPM) and the villagers.

Keywords: *The role, Community Empowerment Institutions (LPM), village development*

Abstrak

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep. Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemberdayaan masyarakat Dalam pembangunan Desa. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan dipilih langsung oleh peneliti yang disebut sasaran penelitian berdasarkan karakteristik informan yang telah di tetapkan yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan Hasil penelitian di lapangan peneliti dapat melihat bahwa, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana yaitu ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam mengerjakan setiap pembangunan yang di lakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Faktor pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu sumber daya yang di miliki oleh aparatur Desa, selalu adakan rapat koordinasi. Faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu transportasi laut dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam membantu pemerintah desa dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengerjakan setiap pembangunan yang ada. Keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sabalana, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, ketua LPM dengan masyarakat Desa.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Pembelajaran Masyarakat (LPM), pembangunan desa*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam pembangunan di Desa Dalam sistem Pemerintahan Desa adalah (1) merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah, (2) menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan. Untuk menjelaskan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa yang sudah di buat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan, yaitu (1) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, (2) menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan pancasila, (3) menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun., (4) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; (5) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; (6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; (8) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan (Kirana, 2018).

Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Landasan hukum dari peran LPM dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, yang menyebutkan: (a) Desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (b) Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. (c) Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. (d) Pelaksanaan program dan kegiatan yang

bersumber dari pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilaksanakan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki berbagai peranan penting guna untuk meningkatkan pembangunan di desa sabalana. Jika dilihat dari realitas sosial yang terjadi di desa sabalana untuk saat ini terkait sistem pembangunannya itu belum sesuai dengan harapan yang diinginkan pada umumnya. Artinya peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa sabalana belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Kita ketahui bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan di setiap desa. Untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaga

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa sesuai harapan atau tujuan yang ingin dicapai, maka menurut peneliti, seharusnya ketua LPMD desa sabalana dan anggotanya lebih memperhatikan dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah setempat demi tercapainya pembangunan yang merata pada setiap desa khususnya di desa sabalana

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan pendekatan studi kasus (Nofriansyah, 2018). Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap terkait peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep dapat terselesaikan. Fokus Penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, faktor pendukung dan penghambat lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Teknik penentuan informan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut antara lain: (1) Informan kunci yaitu ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. (2) Informan utama yaitu Kepala Desa Sabalana. (3) Informan tambahan yaitu: 5 orang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 5 orang tokoh agama perempuan dan pemuda.

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, dokumentasi dan peneliti itu sendiri sebagai pendukung dalam penelitian. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu Peneliti itu sendiri, Pedoman wawancara, Pedoman observasi, yaitu lembar acuan yang berisi kegiatan-kegiatan yang diamati di lapangan buku catatan dan alat tulis, kamera dan *recorder* yang digunakan ketika penulis melakukan observasi. Teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Tehnik keabsahan data yaitu dengan menggunakan Triangulasi sumber, triangulasi waktu, Triangulasi teori dan Triangulasi teknik. Tekhnik yang digunakan pada penelitian ini digunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, kemudian peneliti mengonfirmasikan dengan studi

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data akan terjamin.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti menjelaskan terkait dari hasil penelitian dengan pemahaman peneliti sendiri, sehingga dapat memberikan pemahaman oleh pembaca terkait apa yang diteliti.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kita ketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat berperan penting dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa. Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat berperan penting dalam setiap pembangunan yang dilakukan, lembaga pemberdayaan masyarakat juga memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, dan pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Setelah melakukan wawancara atau beberapa pertanyaan kepada informan, peneliti melihat bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat belum menjalankan Peran, tugas dan fungsinya dengan baik (Belum Efektif) meskipun dilihat dari segi pembangunan yang ada di Desa Sabalana sudah ada perubahan. Peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa Sabalana menyadari bahwa berjalanya suatu pembangunan di Desa tak lain karena bantuan dari salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari LPM kabupaten, kota, dan provinsi.

Peneliti menyadari bahwa kurang efektifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan semata-mata karena kesalahannya namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang pertama yaitu faktor kurangnya transportasi laut, kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu LPM dalam pelaksanaan setiap pembangunan yang di keluarkan oleh pemerintah. Faktor lain dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu komunikasi antara pemerintah Desa Sabalana kepada ketua LPM dan masyarakat Desa masih kurang dalam artian masih perlu di tingkatkan agar LPM bisa berperan aktif dalam setiap pembangunan yang dilakukan dan menjalankan tugasnya dengan baik di Desa Sabalana.

Efektifnya lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan Desa itu tak lain karena bantuan dari masyarakat desa atau partisipasi masyarakat yang ada di Desa Sabalana. Namun realitas yang terjadi saat ini pada masyarakat yang ada di Desa Sabalana mengenai apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengerjakan setiap pembangunan yang dilakukan di desa masih terhitung sangat rendah sekali, mengapa demikian karena masyarakat memegang istilah bukan mereka yang digaji, istilah seperti inilah yang sulit dihilangkan pada diri masyarakat yang ada di Desa dan kurangnya rasa kesadaran dalam diri (Muhtarom, 2016).

Keterlibatan masyarakat desa dalam mempertahankan hasil pembangunan yang ada, bisa menunjang keberhasilan pemerintah desa atau lembaga pemberdayaan masyarakat dalam merubah desa sabalana yang awalnya dicap sebagai desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang seperti saat ini (Maryani & Nainggolan, 2019).

Kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi seorang kepala desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa sabalana semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat desa, untuk itu kepemimpinan dan partisipasi dari masyarakat yang ada di desa sebenarnya harus berjalan seiringan agar supaya tercipta suasana yang baik sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik dan berkembang bisa terwujud. Efektifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti melahirkan sebuah perubahan pada masyarakat desa (Bhinadi, 2017).

Teori revolusi yang dikatakan oleh Sztompka (2004:357) bahwa revolusi mempunyai lima perbedaan dengan bentuk perubahan sosial yang lain di antaranya yaitu: Revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat baik dari segi ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Teori yang dikemukakan Sztompka tersebut maka kaitannya dengan hasil penelitian, yaitu peneliti melihat bahwa terjadinya perubahan pada masyarakat desa bukan semata-mata terjadi hanya perubahan dalam bentuk pembangunan saja tetapi perubahan yang terjadi itu baik dalam segi ekonomi masyarakat desa, politik, budaya, organisasi, kehidupan sehari-hari dan kepribadian manusia. Seperti halnya dari segi ekonomi pada masyarakat desa sekarang sudah ada perubahan. Terjadinya perubahan pada masyarakat desa itu pasti mempengaruhi budaya atau kebiasaan yang ada pada masyarakat.

Menurut Fani & Ma'ruf (2016) meningkatnya pembangunan atau terjadinya perubahan di desa sabalana, baik dari segi pembangunan fisik dan non-fisik, tak lain karena adanya tindakan sosial yang baik pada masyarakat desa. Seperti yang dikemukakan oleh Max Weber dalam Vegeer, Karel J, yang mengatakan pada dasarnya tindakan sosial dapat dibedakan menjadi empat tipe, diantaranya yaitu: bersifat rasional (instrumental), tindakan sosial yang bersifat rasional adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar (masuk akal). Artinya tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan secara matang tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mengaitkan teori perubahan sosial dengan sebuah pembangunan yang dilakukan di desa Sabalana, maka berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa, peneliti melihat bahwa sebelum melakukan pembangunan, terlebih dahulu pemerintah desa sudah merancang, memikirkan, menceritakan, dan memutuskan secara matang melalui musyawarah bersama dengan masyarakat desa dan melibatkan beberapa anggota dari lembaga-lembaga yang ada di desa Sabalana untuk membahas mengenai pengadaan pembangunan. Pemerintah menceritakan apa manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan tersebut. Artinya pihak yang berwenang di desa tersebut sudah memutuskan secara matang melalui musyawarah bersama sebelum melakukan pembangunan, baik itu dari segi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yang ada di desa sabalana dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa Sabalana (Syaprianto & Prihatin, 2016).

Keterkaitan teori struktural fungsional dengan faktor penghambat peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Peneliti melihat bahwa yang menjadi faktor penghambat peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Sabalana, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu lembaga pemberdayaan masyarakat dalam mengerjakan pembangunan, komunikasi antara Pemerintah Desa kepada ketua LPM juga masih kurang (perlu ditingkatkan), dan sumber daya manusia kurang dalam artian (kurang pengetahuannya) sehingga LPM merasa kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dilihat jawaban dari beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Parsons dalam Nursalam dan Suardi (2016:74) teori struktural fungsional dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem "tindakan" yang disebut dengan struktur dan sistem. Dengan definisi ini Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah: seperti yang

dikatakan Parsons mengenai adaptasi ialah sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Dilihat dari faktor penghambat LPM dalam pembangunan Desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu LPM dan pemerintah Desa dalam setiap pembangunan yang dilakukan, tak lain karena sistem belum berjalan efektif dalam mengatur masyarakatnya dalam arti pemerintah desa dan ketua LPM kurang beradaptasi dengan masyarakat desa. Mengenai pencapaian tujuan yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya. Untuk mencapai tujuan atau keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan desa baik dari segi pembangunan fisik dan non-fisik maka pemerintah desa dan ketua LPM sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat desa. Integrasi adalah sebuah sistem harus mengatur antara hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya dan pemeliharaan pola ialah Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopan motivasi.

Menurut Parsons dalam Nursalam dan Suardi (2016:74) mengenai integrasi dan pemeliharaan pola, maka pemerintah desa atau ketua lembaga pemberdayaan masyarakat lebih meningkatkan atau menegaskan kepada masyarakat desa melalui sosialisasi bahwa betapa pentingnya kerjasama dalam membantu pemerintah desa dan LPM dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa Sabalana. Pemerintah desa atau LPM sebaiknya memberi motivasi, menyampaikan arahan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga atau memelihara dengan baik setiap jenis pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat desa Sabalana demi ketahanan setiap pembangunan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa: (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan setiap pembangunan yang dilakukan di desa, kita ketahui bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu membantu pemerintah desa dalam merancang, dan melaksanakan setiap pembangunan yang ada. Namun dilihat dari hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dari segi pembangunan fisik dan non-fisik sudah ada perubahan. (2) Faktor penghambat peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu

kurangnya partisipasi masyarakat dan transportasi. (3) Faktor penghambat peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah sumber daya aparatur desa dan adakan rapat.

Saran

Sebagai saran dalam penelitian ini (1) Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat semoga tetap semangat dan bisa lebih efektif dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sabalana. Serta masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya dalam membantu pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan. (2) Bagi pembaca hasil penelitian ini untuk dapat memberikan kritik dan masukan yang membangun bagi peneliti. (3) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian masalah peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa mampu mencari informasi yang akurat melalui sumber-sumber atau informasi yang benar-benar mengetahui apa yang akan diteliti dan melakukan observasi secara langsung ke lapangan.

Daftar Pustaka

- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Deepublish.
- Faini, R. N., & Ma'ruf, M. F. (2016). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mendukung Pembangunan di Desa Kedunglumpung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 1–8.
- Kirana, M. A. (2018). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*. Universitas Sriwijaya.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 181–204.
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Deepublish.
- Nursalam, & Suardi. (2016). *Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia*. Perpustakaan Nasional.
- Syaprianto, & Prihatin, P. S. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa Pembangunan si Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, 11(1), 59–70.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada.